



EKSKALASI LITERASI KEUANGAN BADAN USAHA MILIK "KALURAHAN" DI KABUPATEN SLEMAN MELALUI PELATIHAN AKUNTANSI DASAR

Resi Ariyasa Qadri^{1*)}; Syanni Yustiani²⁾; Ria Dewi Ambarwari³⁾

¹⁾ resi.ariyasa@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ syanni@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ riadewi@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

* Penulis Korespondensi

Abstract

This study focuses on the dynamics of stimulus provision and financial reporting practices in village-owned enterprises (BUMKAL) in Sleman Regency. The primary objective is to evaluate the effectiveness of basic accounting training in enhancing the transparency and accountability of BUMKAL's financial management. The methodology includes situational analysis through field studies, training, and mentoring. The findings indicate that, despite significant improvements in the accounting knowledge and skills of BUMKAL managers, there remains a variation in the application of proper accounting practices among different BUMKAL. Notably, BUMKAL Amanah has shown excellent progress in financial management, whereas others like Umbul Sembadha still require further improvements. The study concludes that ongoing training and mentoring are crucial to ensure all BUMKAL in Sleman achieve and maintain high accounting standards.

Keywords: Accounting, Assistance, BUMKAL, Financial Literacy, Training

Abstrak

Penulisan artikel ini berfokus pada dinamika pemberian stimulus dan praktik pelaporan keuangan di badan usaha milik kalurahan (BUMKAL) di Kabupaten Sleman. Tujuan utama dari pemberian stimulus tersebut adalah untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan akuntansi dasar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan BUMKAL. Metode yang digunakan meliputi analisis situasi melalui studi lapangan, pelatihan, dan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan akuntansi para pengurus BUMKAL, masih terdapat variasi dalam penerapan praktik akuntansi yang tepat di antara BUMKAL yang berbeda. Khususnya, BUMKAL Amanah menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan, sementara BUMKAL lain seperti Umbul Sembadha masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua BUMKAL di Sleman dapat mencapai dan mempertahankan standar akuntansi yang tinggi.

Kata Kunci: Akuntansi, BUMKAL, Literasi Keuangan, Pelatihan, Pendampingan

PENDAHULUAN

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di tingkat desa, termasuk di Kabupaten Sleman (Ube, 2022). Dana desa, sebagai implementasi langsung dari Undang-Undang tersebut, telah mengalami transformasi menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi desa (Priska et al., 2021), yang secara signifikan memengaruhi pendapatan, anggaran, serta belanja desa di Sleman (Safitri & Fathah, 2018). Tujuan utama pengalokasian dana desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah untuk mendukung komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan sumber daya di desa (Marekan & Ansori, 2019). Hal ini dimaksudkan agar desa-desa di Sleman menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan berdemokrasi (Wiraswaryani et al., 2023). Dana desa menjadi katalisator penting dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan di desa-desa Sleman, menuju terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Ubaidillah et al., 2023).

Prioritas penggunaan dana desa di Sleman ditujukan untuk pembiayaan program-program dan kegiatan-kegiatan berskala lokal yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup mereka (Yudistira & Sunarno, 2021). Program dimaksud termasuk upaya penanggulangan kemiskinan, yang merupakan salah satu



fokus utama. Dalam konteks Kabupaten Sleman, alokasi dana desa diarahkan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat, disesuaikan dengan kondisi spesifik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa di Sleman (Kusumo & Yani, 2021). Prioritas alokasi ini sejalan dengan pencapaian target-target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun setiap tahun. Dengan adanya dana desa, setiap desa di Kabupaten Sleman sekarang memiliki lebih banyak otonomi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, serta pembangunan desa (Safitri & Fathah, 2018; Zulbetti et al., 2019). Otonomi ini tidak hanya menandai langkah besar dalam pemberdayaan desa, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Sleman (Cahyaningtyas et al., 2020; Fahlevi et al., 2021).

Di Kabupaten Sleman, alokasi dana desa yang disalurkan kepada pemerintah desa memiliki komposisi yang telah ditetapkan: 30% dari dana tersebut dialokasikan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa, sementara 70% lainnya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat desa (Safitri & Fathah, 2018). Pemberdayaan ini mencakup pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, program-program di bidang pendidikan dan kesehatan, serta inisiatif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan (Azzam & Koswara, 2022; Mujiburohman, 2022). Dana ini juga meliputi bantuan keuangan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Peningkatan pemasukan desa yang dihasilkan dari dana desa ini berpotensi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa di Sleman melalui penguatan kelembagaan desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diputuskan melalui proses musyawarah desa (Abidin, 2019). Keputusan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.

Dalam proses implementasi dana desa di Kabupaten Sleman, muncul permasalahan signifikan terkait pengelolaan dana tersebut. Walaupun dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan di berbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan, muncul kekhawatiran yang berkembang di antara masyarakat mengenai kapasitas dan kompetensi perangkat desa dalam mengelola anggaran yang disediakan (Nugraha et al., 2022; Rizal et al., 2022). Permasalahan ini diperburuk oleh kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Permasalahan ini mengakibatkan pengawasan atas penggunaan dana desa tidak berjalan secara efektif. Akibatnya, ditemukan beberapa kasus administratif dan manajerial yang menimbulkan persepsi negatif tentang penyelewengan dana.

Di Kabupaten Sleman sendiri, kondisi pengelolaan APBDes masih jauh dari kata ideal. Mulai dari permasalahan administratif dalam proses manajerial hingga ke penyelewengan penggunaan dana (Lengkong & Tasik, 2018), kondisi ini menuntut adanya tindakan konkret untuk peningkatan kapasitas perangkat desa (Mawardi & Firmansyah, 2023). Terutama dalam hal literasi keuangan, diperlukan usaha terpadu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa (Heret et al., 2022; Setiawan et al., 2022). Pemerintah Kabupaten Sleman dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa (Fitriansyah & Nuryakin, 2021; Kodriyah et al., 2022). Fokus khusus harus diberikan pada pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi, terutama bagi desa-desa yang memiliki atau sedang mengembangkan BUMDES-nya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengelolaan dana desa, memperkuat integritas, serta meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa bagi kepentingan masyarakat Sleman (Nadira et al., 2020; Ube, 2022).

Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap proses pengelolaan dana desa selama periode 2016 hingga 2018 telah mengungkapkan beberapa fakta aktual terkait pelaksanaan APBDes (Darmi, 2016; Maulana, 2023), yang juga berdampak pada



pengelolaan dana desa di Kabupaten Sleman. Dari evaluasi tersebut, teridentifikasi empat isu utama yang menjadi sumber perhatian. Pertama, terdapat kekurangan dalam regulasi dan petunjuk pelaksanaan yang menjadi panduan dalam pengelolaan keuangan desa. Kekurangan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan anggaran di tingkat desa (Fahlevi et al., 2021; Maharani & Cipta, 2022), termasuk di Sleman. Kedua, evaluasi KPK menyoroti adanya potensi masalah dalam tata laksana, termasuk pemahaman yang kurang mengenai kerangka waktu dan transparansi dalam proses manajerial (Cahyaningtyas et al., 2020; Safitri & Fathah, 2018). Di Sleman, masalah transparansi dimaksud dapat berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketiga, terdapat kelemahan dalam hal pengawasan pelaksanaan APBDes. Pengawasan yang tidak efektif berisiko memperburuk masalah integritas dan efisiensi dalam penggunaan dana (Mujiburohman, 2022; Rizal et al., 2022), yang sangat penting untuk diatasi di Kabupaten Sleman. Terakhir, hasil evaluasi KPK juga menunjukkan adanya masalah sumber daya manusia, khususnya terkait potensi korupsi dan *fraud* oleh tenaga pendamping desa (Hadi et al., 2018; Manihuruk, 2021). Di Kabupaten Sleman, masalah ini sangat krusial karena tenaga pendamping desa memiliki peran penting dalam membantu perangkat desa, termasuk pengurus BUMDES, dalam pengelolaan dananya.

Beberapa studi terdahulu, seperti studi oleh Priska et al. (2021) dan Ubaidillah et al. (2023), telah menelaah tentang peningkatan literasi keuangan melalui pelatihan akuntansi bagi para aparat desa yang ternyata dapat membantu mereka dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah desa dan BUMDES-nya. Heret et al. (2022) menjelaskan bahwa pelatihan ini dapat membantu para aparat desa dalam mengelola keuangannya dengan lebih baik. Dengan semakin meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, akan semakin kuat juga hubungan antara pemerintah desa dan masyarakatnya. Setiawan et al. (2022) mengungkapkan bahwa pelatihan akuntansi bagi para aparat desa juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi, seperti para akademisi di level pendidikan tinggi. Selain itu, Nugraha et al. (2022) dan Rizal et al. (2022) menguraikan bahwa aparat desa juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan para pengurus BUMDES dalam penyusunan laporan keuangan BUMDES. Mengacu pada beberapa studi terdahulu tersebut, peningkatan literasi keuangan bagi para aparat desa, terutama pengurus bumdes, terbukti tidak hanya mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa dan BUMDES-nya, melainkan juga mampu memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakatnya.

Beberapa contoh pelatihan literasi keuangan yang telah dilakukan meliputi hasil pelatihan keuangan di Desa Cempakamekar, Kabupaten Bandung Barat, menunjukkan bahwa kemampuan aparatur pemerintah desa dalam memahami cara penyusunan laporan keuangan sangat penting bagi terwujudnya akuntabilitas pemerintah desa. Studi di Desa Kadu Genep dilakukan oleh Kodriyah et al. (2022) dengan menggunakan metode pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi keuangan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Studi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan akuntansi bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman Kepala Desa dan pelaku UMKM terkait urgensi laporan keuangan. Studi yang dilakukan oleh Fitriansyah dan Nuryakin (2021) di Kabupaten Aceh Tamiang menemukan bahwa tingkat literasi keuangan aparatur desa cenderung rendah, dan faktor internal, seperti usia, tingkat pendidikan, dan akses terhadap keuangan digital akan memengaruhi tingkat literasi keuangan dimaksud. Hasil studi lain yang dilakukan oleh Hariyani (2022) menunjukkan bahwa pelatihan literasi keuangan bagi rumah tangga petani efektif dalam meningkatkan kompetensi dasar pelaporan keuangan bagi peserta pelatihan. Dari beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelatihan akuntansi bagi para aparat desa, terutama pengurus BUMDES, memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman



akuntansi dan pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, masih ditemukan tingkat literasi keuangan yang rendah di beberapa daerah di Jawa barat dan Aceh, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, seperti usia, tingkat pendidikan, dan akses terhadap keuangan digital.

Oleh karena itu, pelatihan akuntansi dasar yang berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan literasi keuangan dari para pengurus BUMDES sehingga mereka dapat secara mandiri melakukan penyusunan laporan keuangan BUMDES. Selaras dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, kami pun melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), untuk memberikan stimulus berupa pelatihan akuntansi dasar dalam rangka eskalasi literasi keuangan bagi para aparat desa, terkhusus para pengurus Badan Usaha Milik Desa yang oleh masyarakat Sleman sering disebut sebagai Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL). Dengan mengambil sampel sebanyak 10 BUMKAL di Sleman, sebagai objek pelaksanaan pelatihan, kami meneliti lebih dalam terkait respon dari stimulus pelatihan akuntansi yang kami berikan sebagai upaya peningkatan literasi keuangan dari para pengurus BUMKAL. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk (1) menelaah dinamika yang terjadi selama proses pemberian stimulus dan (2) memotret praktik pelaporan keuangan oleh para pengurus BUMKAL di lapangan.

METODE

Untuk mencapai dua tujuan penulisan tersebut, kami telah merancang tiga tahap pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan dari pengurus BUMKAL di Kabupaten Sleman, yang meliputi identifikasi dan pembuatan profil BUMKAL, pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan, serta evaluasi keberhasilan program. **Tahap pertama adalah melakukan identifikasi dan pembuatan profil BUMKAL.** Bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman, kami telah melakukan penilaian terhadap 71 bumkal yang berada di wilayah yurisdiksi dinas dimaksud. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sebagian besar BUMKAL memerlukan dukungan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. BUMKAL ini telah kami klasifikasikan ke dalam empat kelompok: 3 BUMKAL dalam kategori “Maju”, 17 BUMKAL masuk dalam kategori “Berkembang”, 23 BUMKAL masuk kategori “Pelopor”, dan 28 BUMKAL sebagai “Perintis”. Dari 71 BUMKAL tersebut, 10 BUMKAL telah kami pilih sebagai prioritas utama untuk kami berikan stimulus pelatihan akuntansi dasar.

Tahap kedua adalah pemberian stimulus pelatihan akuntansi dasar. Setelah identifikasi dan pembuatan profil BUMKAL, analisis awal pada laporan keuangan BUMKAL untuk tahun 2023 telah kami lakukan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang akan kami atasi melalui pelatihan akuntansi dasar. Analisis ini juga membantu kami dalam memilih BUMKAL yang akan menerima kunjungan dan pendampingan lebih intensif. Program pelatihan akuntansi dasar telah kami laksanakan melalui pendekatan gabungan, secara daring dan luring, sesuai dengan rincian dalam Tabel 1. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dari para pengurus BUMKAL di Sleman, kami telah mengimplementasikan serangkaian kegiatan pendampingan yang terdiri dari sesi luring dan daring.

Tabel 1. Skema Pelatihan Akuntansi Dasar bagi Bumkal Kabupaten Sleman

No	Mekanisme	Kegiatan	Lokasi	Waktu
1	Luring	Pelatihan Memusatkan pengurus dari 10 BUMKAL ke dalam 1 lokasi pusat pelatihan.	Terpusat pada satu lokasi di Kabupaten Sleman, yakni Sekolah Menengah	2 hari



		Pertama Negeri 1 Sleman	
	Visitasi I	BUMKAL Amanah	2 hari
	Bumkal terpilih yang akan dilakukan pendampingan	BUMKAL Umbul Sembadha	
	Visitasi II	BUMKAL terpilih	1 hari
	BUMKAL terpilih dengan status khusus		
2	Daring	Pendampingan	Daring Minimal 90 hari

Setelah pelaksanaan pelatihan, kami melanjutkan dengan kegiatan pendampingan secara daring selama 90 hari kerja, atau sekitar tiga bulan. Selama periode ini, kami memberikan pendampingan kepada bumkal terpilih menggunakan sarana yang telah disepakati bersama dengan para pengurus BUMKAL. Sarana yang kami gunakan meliputi WhatsApp dan Zoom, memungkinkan interaksi yang lebih efisien dan fleksibel. Kami juga menyiapkan opsi untuk melakukan visitasi dan pendampingan kedua secara luring. Kegiatan ini dianggap opsional dan hanya dilaksanakan jika terdapat kendala atau permasalahan yang tidak dapat diatasi melalui pendampingan daring selama dua bulan pertama. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa bumkal telah mandiri dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Tahap ketiga adalah evaluasi program. Setelah pelaksanaan pelatihan akuntansi dasar, evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan terhadap peningkatan literasi keuangan dari para pengurus BUMKAL. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa kapasitas para pengurus BUMKAL dalam penyusunan laporan keuangan telah meningkat secara signifikan. Melalui implementasi tiga tahap pelaksanaan kegiatan tersebut, peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan BUMKAL di Kabupaten Sleman diharapkan dapat terwujud sehingga stimulus yang diberikan dapat berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMKAL. Peningkatan akuntabilitas tersebut diharapkan akan membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi “kalurahan” atau desa serta kesejahteraan masyarakat di Sleman.

Efektivitas dari kegiatan ini juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari mitra terkait. Mitra yang terlibat dalam program ini adalah DPMD Kabupaten Sleman serta Tim Pelaksana. Peran serta manfaat dari keterlibatan mitra dalam kegiatan pemberian stimulus pelatihan akuntansi dasar ini dapat dilihat lebih detail dalam Tabel 2. Kegiatan ini dirancang untuk berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan menghasilkan output yang dapat diukur secara objektif. Sebagai bagian penting dari strategi ini, kami telah menyusun output kegiatan dan indikator capaian yang telah ditentukan. Keduanya berfungsi sebagai alat untuk menilai keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini, memastikan bahwa setiap aspek dari kegiatan tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kompetensi pengelola bumkal.

Tabel 2. Peranan Mitra

No.	Nama Mitra	Peran	Manfaat
1.	DPMD Sleman	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan Menyiapkan sumber daya khususnya sumber daya manusia yang akan didampingi oleh tim 	<ul style="list-style-type: none"> Memberi kemudahan bagi tim untuk menyelenggarakan acara pelatihan. Mempermudah koordinasi tim dalam melakukan pendampingan



No.	Nama Mitra	Peran	Manfaat
2.	Tim Pelaksana	<p>Terlibat aktif dalam proses pelatihan, pendampingan dan pembuatan laporan kegiatan</p> <p>Tugas Tim:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasi kesesuaian & kebutuhan pengmas • Mengkoordinasikan kelayakan pengmas sesuai topik yang dipilih • Melakukan review penulisan proposal • Mereview <i>draft</i> laporan • Finalisasi laporan • Memberikan pelatihan terkait materi penyusunan laporan keuangan bumkal • Mereview artikel pengmas 	Menjadi sarana pembelajaran bagi dosen dalam melakukan praktik nyata bidang akuntansi

Tabel 3. Luaran dan Indikator Capaiannya

No	Luaran	Indikator Capaian	
		Awal	Akhir
1	Terlaksananya program pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengurus BUMKAL terkait penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan	Identifikasi kebutuhan pelatihan dan penyiapan materi	Terlaksanakanya program pelatihan sesuai jadwal dan penyelenggaraan evaluasi dalam bentuk pengisian formulir via aplikasi Google Form
2	Visitasi tahap 1 dan pendampingan salah satu BUMKAL di Kabupaten Sleman	Identifikasi kebutuhan pendampingan singkat berdasarkan laporan keuangan yang dimiliki mitra	Terlaksanakanya program visitasi dan pendampingan singkat dan diperoleh hasil identifikasi untuk bahan pendampingan daring untuk tahap selanjutnya
3	Visitasi tahap 2 dan pendampingan salah satu BUMKAL di Kabupaten Sleman	Identifikasi kebutuhan pendampingan singkat berdasarkan laporan keuangan yang dimiliki mitra	Terlaksanakanya program visitasi dan pendampingan singkat dan diperoleh hasil identifikasi untuk bahan pendampingan daring untuk tahap selanjutnya
4	Pendampingan BUMKAL secara daring melalui sarana yang telah disetujui bersama dengan pihak BUMKAL.	Hasil identifikasi awal laporan keuangan <i>existing</i> peserta pendampingan.	Terwujudnya laporan keuangan yang disusun oleh bumkal selama periode pendampingan daring.

Tabel 3 memuat berbagai parameter yang telah kami tentukan untuk mengukur efektivitas program, termasuk namun tidak terbatas pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam akuntansi, kemampuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akurat, serta penerapan standar akuntansi yang sesuai. Dengan menggunakan indikator-indikator ini, kami dapat melakukan evaluasi yang transparan terhadap luaran dari kegiatan yang kami lakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas pengurus BUMKAL di Kabupaten Sleman. Upaya ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa pengelola bumkal tidak hanya menerima pelatihan saja, tetapi juga menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam operasional sehari-hari mereka.



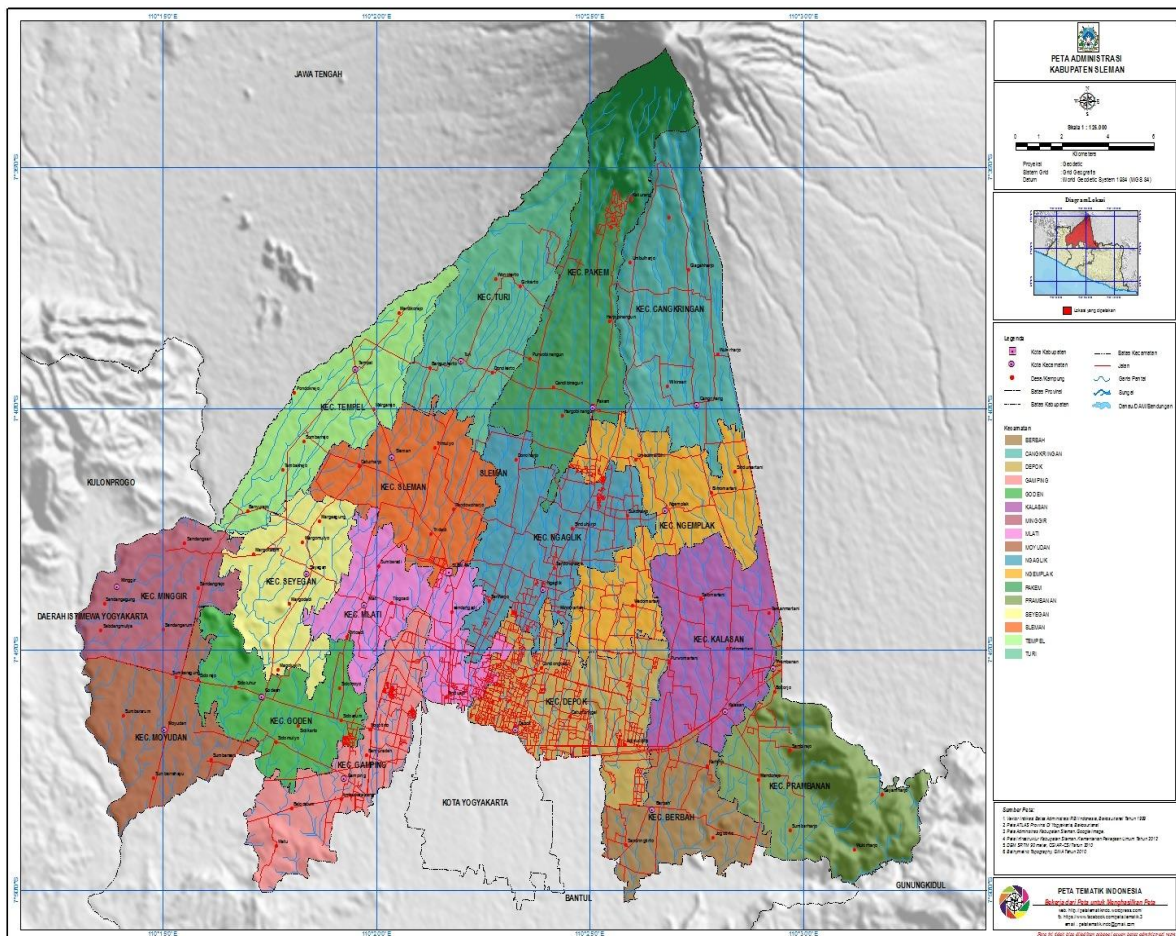
Terkait pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan artikel ini, kami menerapkan beberapa teknik. Teknik-teknik tersebut antara lain meliputi dokumentasi mengenai aturan pengelolaan dana desa pada BUMKAL, diskusi terpumpun dengan peserta pelatihan, serta wawancara semi-terstruktur dengan dua informan terpilih dari dua BUMKAL yang berbeda. Kedua informan ini adalah direktur BUMKAL Amanah dan direktur BUMKAL Umbul Sembadha. Kami pun menganalisis hasil pengumpulan data ini dengan menggunakan analisis tematik untuk menjawab dua tujuan utama penulisan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sleman, yang secara geografis terletak antara 110° 33' 00" dan 110° 13' 00" Bujur Timur, serta 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan, merupakan wilayah strategis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dikelilingi oleh Kabupaten Boyolali dan Klaten di Jawa Tengah, serta Kabupaten Kulon Progo, Magelang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul di DIY, Sleman berada di persimpangan penting antara dua provinsi. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, meliputi 86 desa dan 1212 dusun. Wilayah ini memiliki perbatasan langsung dengan semua kabupaten di DIY dan beberapa di Jawa Tengah, menunjukkan posisinya yang unik dan penting. Pada Gambar 1, terlihat jelas posisi strategis Kabupaten Sleman ini. Sejalan dengan lokasinya yang strategis, kabupaten ini juga mengalami perkembangan signifikan dalam inisiatif Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan nama BUMKAL oleh masyarakat Sleman.

Berdasarkan profil terbaru yang dibuat oleh DPMD Kabupaten Sleman, terdapat 71 unit BUMKAL yang masih memerlukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut dalam penyusunan laporan keuangan mereka sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Klasifikasi bumkal ini dibagi menjadi empat kategori: 3 BUMKAL dikategorikan sebagai "Maju", 17 BUMKAL sebagai "Berkembang", 23 BUMKAL sebagai "Pelopor", dan 28 BUMKAL dikategorikan sebagai "Perintis". Kategorisasi ini menunjukkan tingkat perkembangan dan kesiapan masing-masing BUMKAL dalam mengelola keuangan mereka secara mandiri dan profesional. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan akuntansi, fokus kami tertuju pada sepuluh BUMKAL di Kabupaten Sleman, sebagaimana dirinci dalam Tabel 4.

Melalui analisis situasi yang telah kami lakukan, kami mengidentifikasi beberapa tantangan krusial yang dihadapi oleh mitra BUMKAL. Salah satu masalah utama yang mendesak untuk diselesaikan adalah kurangnya kompetensi para pengurus dalam menyusun laporan keuangan BUMKAL. Beberapa dampak yang timbul dari permasalahan ini meliputi: (1) kurangnya pengetahuan di kalangan pengurus BUMKAL mengenai prosedur pendirian BUMKAL; (2) proses manajerial dan sistem akuntansi BUMKAL yang sering kali dilakukan secara sporadis dan tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) inkompetensi para pengurus dalam pengelolaan dana dan penyusunan laporan keuangan BUMKAL menyebabkan beragam permasalahan, dari kesalahan administratif hingga penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.



Gambar 1. Lokasi Geografis Kabupaten Sleman
Tabel 4. Partisipasi BUMKAL

No	Kecamatan	Kalurahan	Nama BUMKAL	KATEGORI
1	Berbah	Tegaltirto	BUMDes Tirtomulyo	Perintis
2	Gamping	Trihanggo	BUMDesa Trihanggo Astaguna	Pelopor
3	Godean	Sidokarto	BUMDes Kerta Sembada	Pelopor
4	Godean	Sidomoyo	BUMDes Makmur	Perintis
5	Mlati	Sendangadi	BUMDes Sendang Makmur	Perintis
6	Mlati	Tirtoadi	BUMDes Tirtamas	Pelopor
7	Ngaglik	Sinduharjo	BUMDes Amanah	Berkembang
8	Ngemplak	Umbulmartani	BUMDes Umbul Sembada	Pelopor
9	Ngemplak	Wedomartani	BUMDes Wedo Sembodo	Perintis
10	Tempel	Banyurejo	BUMDes Banyu Mataram	Perintis

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengimplementasikan stimulus pelatihan akuntansi dasar yang mencakup: (1) pengembangan kompetensi dalam bidang akuntansi dan penyusunan laporan keuangan BUMKAL sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP); (2) peningkatan keterampilan dalam mencatat transaksi keuangan BUMKAL dengan menggunakan aplikasi akuntansi dan keuangan yang disusun oleh Politeknik Keuangan Negara STAN; (3) pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan BUMKAL, dan (4) pendampingan untuk mencapai tata kelola yang berkualitas, baik dalam aspek kinerja keuangan maupun proses bisnis BUMKAL.

Kami pun berharap dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan kepada para pengurus BUMKAL, khususnya dalam pengelolaan dana dan penyusunan laporan



keuangan BUMKAL. Selain itu, tim pelaksana juga akan berperan sebagai teman diskusi dalam membangun sistem akuntansi BUMKAL yang lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan akuntansi dasar ini sangat penting untuk mendukung para pengurus BUMKAL di Kabupaten Sleman dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan BUMKAL secara lebih profesional.

Secara umum, keberadaan BUMKAL di Kabupaten Sleman telah menjadi inisiatif kunci dalam pemberdayaan ekonomi desa, memegang peran vital dalam usaha mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Fokus BUMKAL terletak pada pengelolaan sumber daya lokal, pengembangan usaha mikro, dan penciptaan peluang kerja. Namun demikian, untuk mengoptimalkan potensinya, para pengurus BUMKAL membutuhkan keahlian yang mendalam dalam hal pemahaman potensi desa, pengembangan bisnis, dan pelaporan keuangan. Mengingat pentingnya keahlian ini, kami pun telah mengadakan pelatihan pada tanggal 6 hingga 7 Juni 2023 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sleman. Kegiatan tersebut pun dihadiri oleh sepuluh BUMKAL di Kabupaten Sleman yang menjadi target pelatihan, yakni Astaguna, Amanah, Umbul Sembada, Kerta Sembada, Sendang Makmur, Tirtamas, Tirto Mulyo, Wedo Sembodo, Makmur, dan Banyu Mataram.

Tabel 5. Daftar Peserta Kegiatan Pelatihan Laporan Keuangan BUMDES

No.	Nama Peserta	BUMDES/ BUMKAL	Jabatan	Praktik Pencatatan dan Laporan Keuangan
1.	Dwi Effendi	BUMKAL Amanah	Pengurus	Pencatatan transaksi dan laporan keuangan sudah memadai, namun masih terdapat beberapa transaksi pengelolaan bukti transaksi yang perlu dilakukan penyempurnaan, yaitu: pengelolaan kas kecil, dan perlakuan penyusutan belum diterapkan.
2.	Heni Astami	BUMKAL Umbul Sembadha	Pengurus	Pencatatan transaksi keuangan masih dilakukan secara manual via buku.
3.	Andi Krismano	BUMKAL Kerta Sembada	Pengurus	Belum memahami praktik akuntansi dan laporan keuangan
4.	Dian Nurwita Sari	BUMKAL Sendang Makmur	Pengurus	Belum memahami praktik akuntansi dan laporan keuangan
5.	Anjar Banan	BUMKAL Tirtamas	Pengurus	Belum memahami praktik akuntansi dan laporan keuangan
6.	Eko Prasetyo	BUMKAL Tirtomulyo	Pengurus	Belum memahami praktik akuntansi dan laporan keuangan
7.	Mukhsin	BUMKAL Mandiri Makmur	Pengurus	Belum memahami praktik akuntansi dan laporan keuangan
8.	Widhi	BUMKAL Dadi Raharjo	Pengurus	Belum memahami praktik akuntansi dan laporan keuangan
9.	Abdurrosid	BUMKAL Bina Makmur	Pengurus	Belum memahami praktik akuntansi dan laporan keuangan
10.	Niken Andiya	BUMKAL Banyu Mataram	Pendamping	Belum memahami praktik akuntansi dan laporan keuangan



Gambar 2. Kegiatan Tahap Pertama: Pelatihan Akuntansi BUMKAL Sleman

Kegiatan yang bertemakan “Ekskalasi Literasi Penyusunan Laporan Keuangan BUMKAL” merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat untuk pemberdayaan BUMKAL di Kabupaten Sleman. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Politeknik Keuangan Negara STAN yang diwakili oleh tim pelaksana dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diwakili oleh DPMD. Kegiatan ini berlangsung selama enam bulan, dimulai pada tanggal 6 Juni 2023 hingga 12 Desember 2023. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahapan, tahap pertama dimulai dengan pelatihan penyusunan laporan keuangan selama dua hari. Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan materi tentang dasar-dasar akuntansi dan teknik penyusunan laporan keuangan BUMKAL. Mereka juga diberikan kesempatan untuk mempraktikkan penyusunan laporan keuangan, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi Microsoft Excel.

Dari sepuluh BUMKAL yang hadir, sembilan BUMKAL diwakili langsung oleh pengurusnya dan satu BUMKAL diwakili oleh pendamping desa. Informasi tentang peserta pelatihan dan isu terkait laporan keuangan tersaji dalam Tabel 5. Pada tahap pertama kegiatan, beberapa peserta menunjukkan pemahaman konsep dan siklus akuntansi yang masih pada tahap dasar. Fakta tersebut menandakan perlunya pendalaman materi dan peningkatan keterampilan dalam konteks penyusunan laporan keuangan. Proses latihan penyusunan laporan keuangan berjalan dengan lancar, meskipun beberapa peserta memerlukan pendampingan lebih lanjut. Adanya diskusi tentang kondisi nyata yang dihadapi oleh BUMKAL dapat meningkatkan pemahaman peserta dalam penerapan teknis akuntansi dalam pencatatan transaksi keuangan BUMKAL. Tim pelaksana memberikan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi penyusunan laporan keuangan sehingga membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Kegiatan pelatihan tahap pertama ini terdokumentasi dalam Gambar 2.

Pada tahap kedua dari kegiatan pelatihan, kami melakukan visitasi lapangan ke dua BUMKAL terpilih. Kegiatan ini, yang dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2023, berfokus pada BUMKAL Amanah dan BUMKAL Umbul Sembadha sebagai objek visitasi. Selama pelaksanaan visitasi di BUMKAL Amanah, Dwi Effendi, yang menjabat sebagai Direktur Utama, memberikan penjelasan detail mengenai proses akuntansi yang dijalankan



dalam pembukuan transaksi keuangan BUMKAL. Dari penjelasannya, kami memperoleh pemahaman bahwa BUMKAL Amanah terletak di desa Sinduharjo, Sleman. BUMKAL tersebut bergerak di bidang jasa keuangan. Pihak BUMKAL menyelenggarakan jasa simpan pinjam terhadap masyarakat desa Sinduharjo, Sleman. Tarif bunga yang diterapkan pun cukup rendah yakni sekita 1% hingga 3% per tahun.



Gambar 3. Kegiatan Tahap Kedua: Visitasi BUMDES Sleman

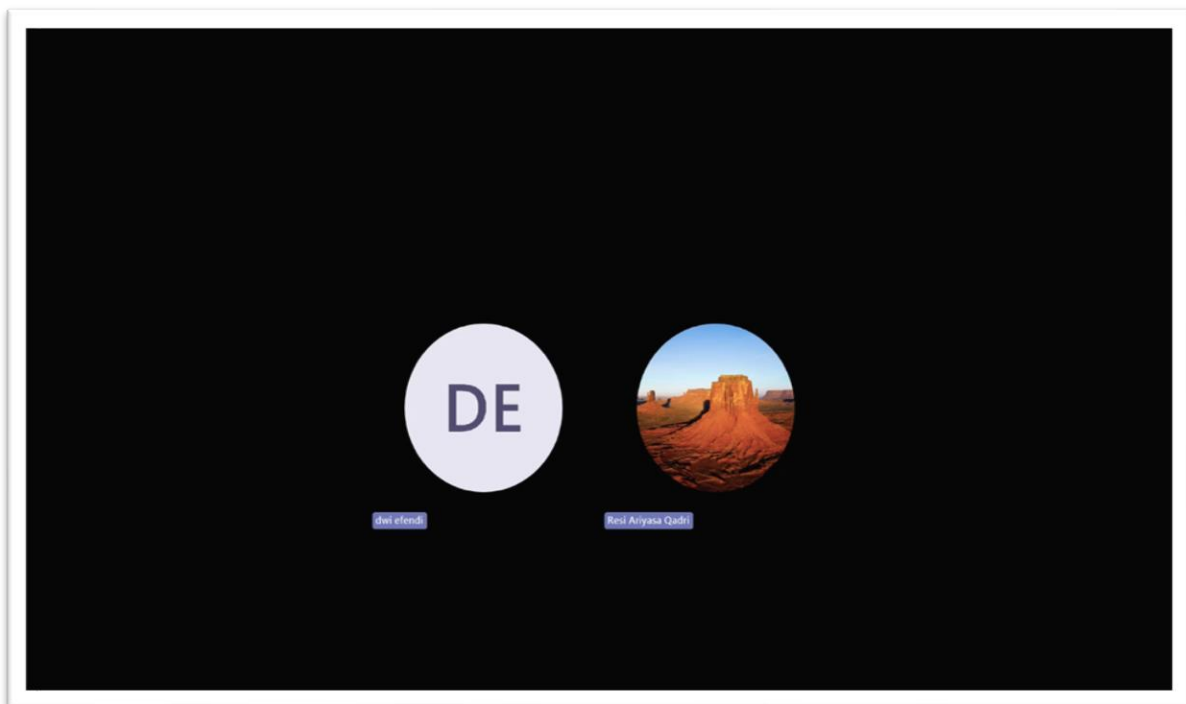
Namun demikian, BUMKAL hanya melayani jasa simpan pinjam kepada masyarakat Sinduharjo saja dan tidak membuka layanan kepada rakyat di desa lainnya. Proses penagihan piutang pun dilakukan secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak Kepala Desa dan keluarga



peminjam. BUMKAL pun sukses melakukan penagihan atas seluruh piutangnya di tahun 2018-2022. Tidak ada satu pun piutang yang tidak tertagih. Selain itu, proses pencatatan dan pelaporan keuangan di BUMKAL Amanah sudah cukup canggih. Mereka berhasil menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran kas, buku bank, neraca, serta laporan laba rugi dengan efektif. Menariknya, pencatatan transaksi keuangan ini dilaksanakan melalui sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, memungkinkan pemantauan posisi keuangan BUMKAL secara *real time*. Pihak BUMKAL menghabiskan dana sebesar Rp15 juta untuk pengembangan aplikasi akuntansi BUMKAL. Selain itu, pengelolaan bukti transaksi keuangan juga teratur dan sistematis.

Di sisi lain, visitasi di BUMKAL Umbul Sembadha mengungkapkan situasi yang berbeda. Heni Astami, Bendahara BUMKAL tersebut, menjelaskan bahwa proses akuntansi di BUMKAL mereka masih memiliki beberapa kekurangan. Pencatatan transaksi keuangan belum berjalan dengan baik, dan belum ada sistematisasi yang efektif atas dokumen atau bukti transaksi. Kendati bukti transaksi telah tersedia, penyusunannya masih kurang runut, belum ada penetapan nomor bukti transaksi, dan belum terdapat otorisasi yang jelas atas pengeluaran kas. Terdapat juga kebutuhan akan penyempurnaan dalam akun-akun aset yang belum diakui ataupun dicatat dengan benar. Pengelolaan bukti transaksi pun memerlukan perbaikan signifikan. Dokumentasi dari kegiatan visitasi ini, yang mencerminkan kondisi aktual kedua BUMKAL tersebut, dapat dilihat pada Gambar 3.

Tahap ketiga, yang merupakan tahap penutup dari kegiatan pelatihan akuntansi dasar ini, adalah pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan secara daring. Kegiatan ini berlangsung selama tiga bulan dan ditujukan kepada BUMKAL terpilih berdasarkan kriteria tertentu, salah satunya adalah keterlibatan dalam transaksi rutin setiap bulannya. Fokus pendampingan selama tiga bulan ini diberikan kepada BUMKAL Amanah.



Gambar 4. Kegiatan Tahap Ketiga: Bimbingan Teknis Daring BUMDES Sleman

Sejak berdirinya pada tahun 2018, BUMKAL Amanah telah mengembangkan beberapa lini usaha, yang mencakup jasa simpan pinjam, jasa *point of payment* BRI, penjualan pulsa listrik, serta penjualan pulsa *handphone*. Pencatatan transaksi keuangan di BUMKAL Amanah sudah berjalan dengan sangat baik, berkat sistem informasi akuntansi yang dikembangkan



bersama pengembang aplikasi dari Yogyakarta. Selain itu, BUMKAL ini didukung oleh modal yang kuat dari pemerintah desa dan pengawasan dari aparat desa setempat, terutama dalam hal pengelolaan modal. Keberhasilan manajemen BUMKAL Amanah telah menjadikannya contoh teladan dalam pengelolaan usaha jasa keuangan di tingkat nasional. Bahkan, BUMKAL ini berhasil mencapai tingkat pengembalian modal yang sangat mengesankan, yaitu sebesar 150%. Dokumentasi dari kegiatan tahap ketiga ini diabadikan dalam Gambar 4.

Melalui kerja sama antara tim pelaksana dan DPMD Kabupaten Sleman, kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan dari para pengurus BUMKAL dalam hal pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Fakta tersebut mendukung hasil studi Angi et al. (2021) serta Hambali dan Maruwae (2021). Kegiatan ini pun berhasil membawa dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan tingkat literasi keuangan dari para pengurus BUMKAL yang lebih optimal, selaras dengan temuan dari (Zulbetti et al., 2019). Tujuan utama dari kegiatan pelatihan ini adalah agar BUMKAL di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dapat memperoleh panduan efektif untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan bidang usaha yang mereka kelola. Harapan kami adalah, dengan menerapkan prinsip akuntansi yang tepat dan memiliki laporan keuangan yang akurat, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan usaha BUMKAL dapat tercapai.

Kinerja badan usaha milik “kalurahan” dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMKAL di Kabupaten Sleman telah meningkat sejalan dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang dicapai oleh BUMKAL tersebut melalui stimulus pelatihan akuntansi dasar tersebut. Temuan tersebut sejalan dengan temuan dari Priska et al. (2021) yang menjelaskan bahwa adanya pelatihan akuntansi dapat meningkatkan peran pengurus dalam meningkatkan kualitas realisasi APBDes. Salah satu kunci untuk mencapai peningkatan ini adalah dengan sepenuh hati memberikan penjelasan yang menarik dan mudah dipahami oleh para peserta pelatihan akuntansi yang seluruhnya tidak memiliki dasar pengetahuan akuntansi (Ubaidillah et al., 2023; Zulbetti et al., 2019). Selain itu, pendampingan secara berkelanjutan terhadap proses penyusunan laporan keuangan BUMKAL pun terbukti mampu membangun sikap positif dari para pengurus BUMKAL sehingga pekerjaan mereka dalam mencatat transaksi keuangan pun menjadi lebih optimal (Cahyaningtyas et al., 2020; Fahlevi et al., 2021). Hal ini termasuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mempraktikkan proses akuntansi transaksi umum dan penyusunan laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (Fitriansyah & Nuryakin, 2021; Maharani & Cipta, 2022).

Di sisi lain, kegiatan pelatihan ini juga berperan dalam meningkatkan kemampuan para dosen yang terlibat dalam tim pelaksana kegiatan, sebagaimana dijelaskan juga melalui studi Angi et al. (2021), Asmedi et al. (2021), dan Musyrifah et al. (2022). Pelatihan tersebut memberi mereka kesempatan untuk berkontribusi dan mengomunikasikan ilmu pengetahuan akuntansi mereka kepada masyarakat secara langsung (Kodriyah et al., 2022; Setiawan et al., 2022). Beberapa evaluasi terkait kegiatan pelatihan ini mencakup beberapa aspek. Pertama, karena sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring, terdapat tantangan dalam mencapai output pendampingan yang optimal, selaras dengan temuan dari studi Nuryati et al. (2021) serta Prasetio dan Hariyani (2021). Kedua, saat ini, pengurus BUMKAL cenderung lebih berfokus pada aspek keberlangsungan usaha dibandingkan pada aspek pelaporan keuangan, sebagaimana terungkap melalui hasil studi Kusuma Dewi & Diko, 2021; Siregar & Jatmiko, 2020). Hal ini seringkali menyebabkan penundaan dari pihak BUMKAL dalam proses pendampingan.

Meski menghadapi berbagai tantangan, program pelatihan bersama badan usaha milik kalurahan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, menunjukkan potensi besar untuk berkembang ke fase berikutnya. Tahapan selanjutnya dari program ini akan lebih berfokus pada pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk



menghasilkan laporan keuangan BUMKAL yang tidak hanya komprehensif dan rinci, tetapi juga layak untuk diaudit. Upaya ini sangat krusial dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas BUMKAL, yang merupakan aspek fundamental dalam memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kredibilitas usaha mereka. Kegiatan lanjutan ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dalam pemahaman dan praktik akuntansi yang saat ini dihadapi oleh BUMKAL, termasuk penanganan transaksi keuangan yang kompleks dan penerapan standar akuntansi yang berlaku.

PENUTUP

Simpulan

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa program pelatihan akuntansi dasar telah berhasil meningkatkan kompetensi pengurus BUMKAL dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan. Melalui pendampingan dan pelatihan, pengurus BUMKAL memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam proses akuntansi dan pencatatan transaksi keuangan. Fakta ini mencerminkan perkembangan positif dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMKAL. Namun, studi ini juga menyoroti perbedaan signifikan dalam praktik pelaporan keuangan di antara beberapa BUMKAL yang menjadi objek pelatihan. Adanya perbedaan tersebut menandakan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat kebutuhan akan pendampingan lanjutan untuk memastikan bahwa semua BUMKAL di Sleman dapat mencapai standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Meskipun beberapa BUMKAL seperti BUMKAL Amanah menunjukkan praktik pengelolaan keuangan yang efektif, masih ada BUMKAL lain yang menghadapi tantangan dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan perlunya usaha berkelanjutan untuk membawa semua BUMKAL di Sleman ke standar akuntansi yang lebih tinggi. Program pelatihan dan pendampingan berikutnya diharapkan dapat mengatasi kesenjangan ini, membantu BUMKAL mencapai standar akuntansi yang tinggi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMKAL. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pengurus BUMKAL, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal, menekankan pentingnya pendampingan lanjutan dalam konteks pengembangan ekonomi desa yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Sleman.

Saran

Untuk pengurus BUMKAL, sangat disarankan untuk terus mengikuti pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan yang diselenggarakan, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang praktik-praktik akuntansi yang baik dan standar pelaporan keuangan. Penting bagi mereka untuk aktif dalam setiap sesi pelatihan dan berupaya menerapkan pengetahuan yang diperoleh ke dalam praktik sehari-hari BUMKAL. Peningkatan keterampilan ini akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan BUMKAL, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMKAL tersebut.

Di sisi lain, untuk tim pelaksana pelatihan, ada baiknya untuk terus mengembangkan dan menyesuaikan materi pelatihan agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik BUMKAL di Kabupaten Sleman. Mereka juga harus mempertimbangkan untuk mengadakan sesi tanya jawab dan diskusi lebih banyak, sehingga memungkinkan interaksi dua arah dan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pengurus BUMKAL. Tim pelaksana juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan pendampingan lanjutan dan dukungan pascapelatihan, terutama kepada BUMKAL yang masih menghadapi tantangan dalam menerapkan praktik akuntansi yang tepat. Dengan pendekatan yang lebih terfokus dan berkelanjutan ini, diharapkan



BUMKAL di Kabupaten Sleman dapat mencapai tingkat kinerja keuangan dan operasional yang lebih tinggi, sekaligus berkontribusi pada pengembangan ekonomi desa yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. *Jurnal Caraka Prabhu*, 1(2), 84–122. <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.95>
- Angi, Y. F., Ga, L. L., & Hewe Tiwu, M. I. (2021). Literasi Anti Fraud pada BUMDes (Desa- desa Wisata) di Kabupaten Kupang. *JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 47–59. <https://doi.org/10.30996/jpm17.v6i1.5158>
- Asmedi, S., Stiawan, H., Syarifudin, S., Napisah, N., & Mundiroh, S. (2021). Peran Akuntansi Dalam Pengelolaan Wirausaha Pada Pondok Pesantren Lembaga Bina Santri Mandiri. *DEDIKASI PKM*, 2(3), 301–315. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v2i3.10725>
- Azzam, N., & Koswara, A. Y. (2022). Arahan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo. *Jurnal Teknik ITS*, 11(3), 54–67. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i3.97167>
- Cahyaningtyas, S. R., Ramadhani, R. S., & Isnaini, Z. (2020). Edukasi Literasi Keuangan Kepada Masyarakat Desa Mekarsari Narmada. *Jurnal Abdimas Independen*, 1(2), 86–90. <https://doi.org/10.29303/independen.v1i2.19>
- Darmi, T. (2016). Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (Study Pada Pengelolaan Dana Desa). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(1), 21–27. <https://doi.org/10.25077/jantro.v18i1.48>
- Fahlevi, M., Yusnaidi, Y., & Irmalis, A. (2021). Strategi Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Bagi Masyarakat Agraris Di Kawasan Pedesaan. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.35308/jbkan.v5i2.4367>
- Fitriansyah, F., & Nuryakin, C. (2021). Desa Digital dan Tingkat Literasi Keuangan Aparatur Desa: Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 220–234. <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.14>
- Hadi, E. R., Murdyastuti, A., & Puspitaningtyas, Z. (2018). Pengaruh Evaluasi Kebijakan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Tenaga Fasilitasi Pendamping Desa Di Kabupaten Lumajang. *Majalah Ilmiah DIAN ILMU*, 17(1), 19–38. <https://doi.org/10.37849/midi.v17i1.72>
- Hambali, I. R., & Maruwae, A. (2021). Entrepreneurship Capacity Building (ECB) New Normal dan Dukasi Pengelolaan Sumber Daya Desa untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Tengah Pandemi. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 10(1), 31–42. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v10i1.10375>
- Hariyani, N. (2022). Efektivitas Pelatihan Literasi Keuangan bagi Rumah Tangga Petani. *Jurnal AgroSainTa: Widyaiswara Mandiri Membangun Bangsa*, 6(2), 37–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.51589/ags.v6i2.3134>
- Heret, N. P., Dince, M. N., & De Romario, F. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Ibu Rumah Tangga Desa Rubit Kecamatan Hewoloang. *Jurnal Accounting UNIPA*, 1(2), 152–164. <https://accounting.nusanipa.ac.id/index.php/accounting/article/view/51>
- Kodriyah, K., Wijaya, H., & Haryadi, E. (2022). Literasi Keuangan Dan Pelatihan Pembukuan SAK-EMKM Di Sentra Tas Desa Kadu Genep Serang Banten. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 126. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i1.36086>
- Dewi, R. C. K., & Diko, T. (2021). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Digital di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. *SNEB :*



- Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Dewantara*, 3(1), 91–96.
<https://doi.org/10.26533/sneb.v1i1.813>
- Kusumo, M. P., & Yani, W. M. (2021). Skema Alokasi Biaya Promosi Kesehatan untuk Mengendalikan DM di Kabupaten Sleman: Studi Kasus. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 6(4), 249. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.67670>
- Lengkong, V. P. K., & Tasik, H. H. D. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (Dp2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(1), 15–28. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19144>
- Maharani, S., & Cipta, W. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(3), 306–315. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/Prospek/article/view/44306>
- Manihuruk, T. N. S. (2021). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 290. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.389>
- Marekan, M., & Ansori, T. (2019). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 1(2), 566–578. <https://doi.org/10.37680/jcd.v1i2.743>
- Maulana, M. (2023). Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 214–231. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i3.435>
- Mawardi, A. I., & Firmansyah, A. (2023). Analisis Faktor Literasi Keuangan Pada Pelaku Umkm Perempuan Di Bumdes Wonoasri, Mojokerto. *JPE: Jurnal Peneliti Ekonomi*, 1(2), 97–111. <https://jurnaljpe.com/index.php/jpe/article/view/52>
- Mujiburohman, D. A. (2022). Mengali Potensi Wilayah di Desa Tepus Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 4(2), 12–21. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v4i2.1050>
- Musyriyah, E., Dwirahayu, G., & Satriawati, G. (2022). Pengembangan Bahan Ajar Matematika Bagi Guru MI Dalam Upaya Mendukung Keterampilan Mengajar Serta Peningkatan Literasi Numerasi. *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika*, 8(1), 61–73. <https://doi.org/10.24853/fbc.8.1.61-72>
- Nadira, P., Yuliani, R., & Dewi, A. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(2), 14–28. <https://doi.org/10.20527/jpp.v1i2.2446>
- Nugraha, N., Nugraha, D., & Novantara, P. (2022). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Melalui Pelatihan Microsoft Office di Desa Caracas Kabupaten Kuningan. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*, 1(1), 17–22. <https://doi.org/10.25134/jise.v1i1.11>
- Nuryati, N., Pramono, A. E., & Desristanto, P. (2021). Perspektif Mahasiswa Mengenai Kendala dalam Pembelajaran Kodifikasi Klinis Secara Daring. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 6(3), 190–201. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.65983>
- Prasetyo, T., & Hariyani, R. (2021). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring Pada Mata Kuliah Akuntansi Di Era New Normal. *Jurnal Perspektif*, 19(1), 57–63. <https://doi.org/10.31294/jp.v19i1.9687>
- Priska, M., Christa, U. R., Husnatarina, F., Negara, D. J., Sambung, R., & Syamsudin, A. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Literasi Keuangan Dan Pemberdayaan



- Masyarakat Terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *JEMBA: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Bisnis, Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.52300/jemba.v1i1.5176>
- Rizal, A., Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (E-Government). *Jurnal EL-RIYASAH*, 13(1), 76–88. <https://doi.org/10.24014/jel.v13i1.18174>
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49>
- Setiawan, A., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Cempakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 171–183. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2602>
- Siregar, H., & Jatmiko, AR. (2020). “Agrifun” untuk Keberlangsungan Usaha BUMDes Karangrejo, Kecamatan Borobudur. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 1(2), 59–70. <https://doi.org/10.35814/suluh.v1i2.1027>
- Ubaidillah, M. F., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2023). Pengaruh Financial Literacy dan Kualitas Pendidikan Terhadap Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)(Studi Kasus pada Desa Pajarakan Kulon, Desa Ketompen dan Desa Selogudig Wetan Kabupaten Probolinggo). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 408–416. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/20679/pdf>
- Ube, Y. R. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dan Penggunaan Dana Desa Di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 599–617. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.569>
- Wiraswaryani, A. K., Sujana, I. N., & Siwantari, N. L. E. (2023). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Anggota Kelompok Pemindangan Desa Pengastulan: Analysis of the Financial Literacy Level of Members of the Pemindangan Village of Pengastulan. *PROSPEK*, 2(2), 1–11. <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/prospek/article/download/2608/1960/10132>
- Yudistira, W., & Sunarno, S. (2021). Faktor Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sultan Ground Sebelum Dan Sesudah Merapi Tahun 2010 Di Desa Umbulharjo Cangkringan. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 222–234. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11491>
- Zulbetti, R., Perwito, P., & Puspita, V. A. (2019). Upaya Peningkatan Literasi Keuangan Pengurus BUMDES Melalui Pelatihan Keuangan di Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(2). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/3824/0>